

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Sejarah Kota Surabaya

Surabaya adalah kota terbesar dan tertua, dengan total luas 330,45 km² dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa. Surabaya merupakan pelabuhan laut dengan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama, Pelabuhan Tanjung Perak berfungsi sebagai pusat untuk pengiriman antar pulau di wilayah Indonesia Timur.

Surabaya sendiri juga dikenal sebagai kota pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik dan memperingati pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Orang-orang dari etnis yang berbeda yang datang dari bagian timur Indonesia datang mengunjungi dan tinggal di Surabaya. Selain dua kelompok etnis yang disebutkan di atas, orang-orang Cina, Arab, dan India keturunan juga mendiami kota ini bersama dengan masyarakat Surabaya asli (Jawa), membuat Surabaya menjadi kota multi-etnis dan multi-agama.

2. Surabaya Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan

Surabaya sendiri memusatkan kegiatannya di sector pembangunan ekonomi dengan focus pada karakteristik orang-orang kota. Hal ini termasuk pelayanan yang menjadi pokok pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Budaya Saing Global

Surabaya menjadi penghubung pusat internasional perdagangan yang didukung dengan akses cukup ke sumber daya produktif, tata pemerintahan yang baik, infrastruktur kota terpadu dan efisien. Hal tersebut mampu meningkatkan ekonomi lokal baik di segi produk dan inovasi layanan, dan pengembangan layanan dan industri kreatif global yang kompetitif.

4. Kota Ramah Lingkungan

Surabaya mampu bersaing di tingkat global dengan dapat mempertahankan kemampuan untuk mengintegrasikan proses perkembangan pesat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kapasitasnya melalui perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah lingkungan. Dimasa lalu Kalimas merupakan pusat ekonomi di Surabaya namun sekarang sebagai kota berkembang, aktivitas ekonom tidak lagi terpusat di Kalimas. Upaya revitalisasi Kalimas dilakukan oleh pemerintah dan daerah tersebut sekarang telah menjadi area dari monumen kapal selam. Dalam area ini terdapat ikon dari kota Surabaya sendiri yaitu “Suro dan Boyo”. Di sepanjang tepi sungai disediakan BMX Park dan Skatepark bagi para pemuda pemudi yang menggeluti hobi tersebut. Kalimas yang sebelumnya diabaikan sekarang menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi dan sebagai tempat untuk memperkenalkan konsep waterfront city yang menambah pesona Surabaya.

5. Smart City

Dalam rangka mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan memberikan pelayanan kualitas tinggi bagi masyarakat, Kota ini memanfaatkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan publik. Selain itu, Surabaya juga menyediakan tempat public utama dengan akses jaringan internet untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Untuk lebih memperluas kemudahan penggunaan dan probabilitas, kota ini juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi mobile dalam memberikan pelayanan publik.

6. Pendidikan Untuk Semua

Di segi pendidikan Pemerintah Kota Surabaya berkomitment untuk memberika pendidikan berkualitas untuk semua orang tidak hanya pada sekolah negeri tapi juga pada sekolah swasta. Para siswa berprestasi yang tidak mampu akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan, guru diberikan kesempatan untuk tetap mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

7. Kota Berprestasi

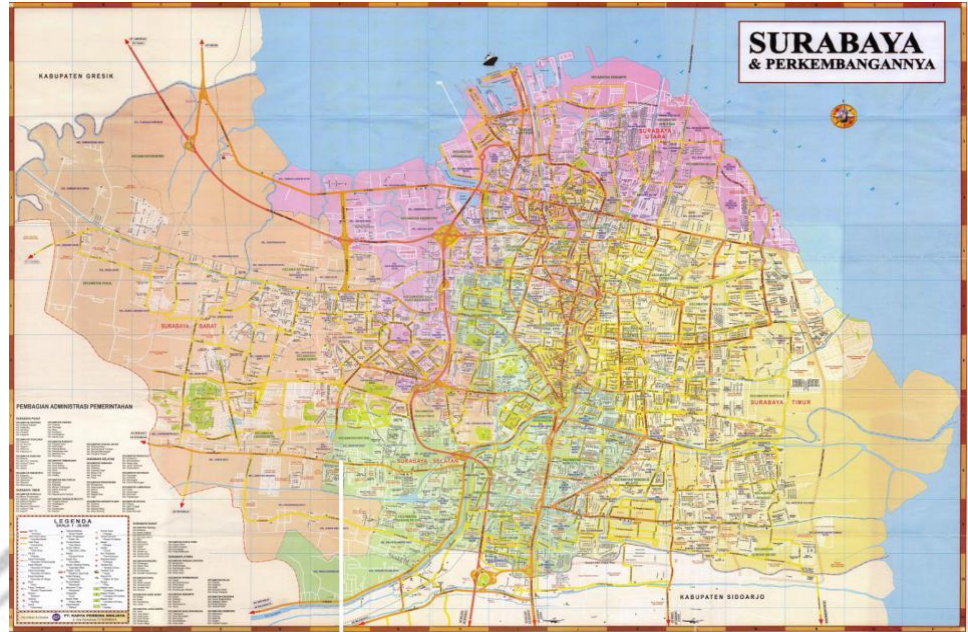
Surabaya sendiri telah diakui dunia internasional dalam banyak aspek prestasi dan penghargaan seperti Asia Townscape Award oleh PBB, ASEAN Enviroment Sustainable City Award, Asian Cities of the Future.¹

B. Aspek Geografis

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara $07^{\circ} 9'$ s.d $07^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}36'$ s.d $112^{\circ}54'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya adalah $326,36\text{km}^2$ yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 154 desa/kelurahan . Batas wilayah Kota Surabaya sendiri di sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat adalah Kabupaten Gresik, dan batas timurnya adalah Selat Madura

Secara topografi, sebagian besar wilayah kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3%. Wilayah barat kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar 6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15%



Gambar 3.1 : Peta Kota Surabaya

Secara geografis Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di selatan Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintas Kota Surabaya, yaitu kali Surabaya, kalimas, kali jagir, dan kali LAmongan. Sebagian daerah hilir Kota Surabaya, sehingga Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya sendiri adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, pola ruang perkembangannya terbagi menjadi :

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun maupun apartement atau kondominium terbesar hampi di seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan kea rah barat, timur dan selatan kota.

2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamongan
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan tekonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamongan, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura dan Jembatan Sukolilo Lor-THP Kenjeran yang membuka akses ke kawasan sisi timur lautan Kota Surabaya.
5. Wilayah ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya, dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2. Kondisi Demografis

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan budaya beragam etnis yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya. Mereka membentuk pluralism budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicara sangat

terbuka, walaupun tampak seperti bertemperament kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran dan senang membantu orang lain.

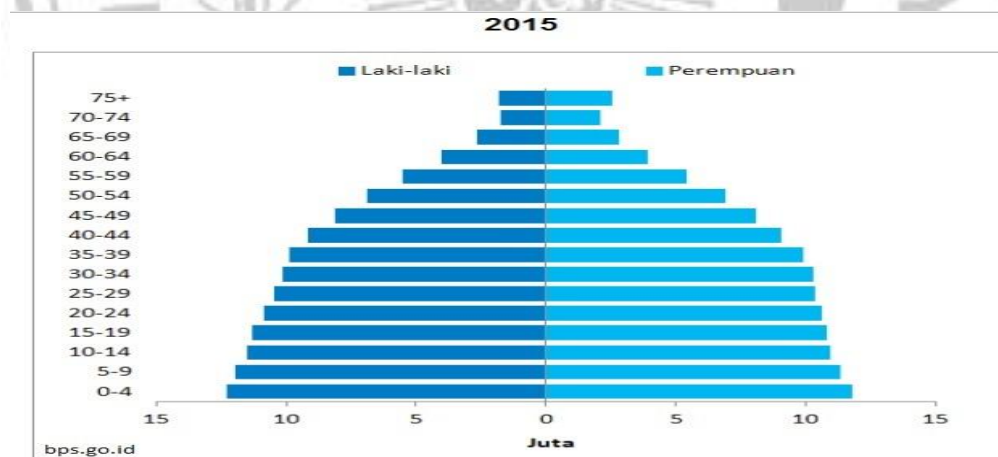
Dengan jumlah penduduk 2.917.688 jiwa pada tahun 2018 Kota Surabaya berkembang menjadi Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis.

Tabel : Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH/KM ²	2015 (DESEMBER)	
			JUMLAH PENDUDUK/KM ²	KEPADATAN PENDUDUK/KM ²
1	KARANG PILANG	9,23	72.379	7.824
2	WONOCOLO	6,78	80.436	11.864
3	RUNGKUT	21,08	108.494	5.147
4	WONOKROMO	8,47	164.122	19.377
5	TEGAL SARI	4,29	104.109	24.286
6	SAWAHAN	6,93	207.101	29.885
7	GENTENG	4,04	60.462	14.966
8	GUBENG	7,99	139.355	17.411
9	SUKOLILO	23,69	108.292	4.571
10	TAMBAK SARI	8,99	223.096	24.906
11	SIMOKERTO	2,59	100.05	38.629
12	PABEAN CANTIAN	6,8	82.601	12.147
13	BUBUTAN	3,86	103.942	26.928
14	TANDES	11,07	91.497	8.265
15	KREMBANGAN	8,34	119.159	14.288
16	SEMAMPIR	8,76	190.158	21.078
17	KENJERAN	7,74	154.531	19.965
18	LAKAR SANTRI	16,05	55.403	3.425
19	BENOWO	26,78	58.613	2.189
20	WIYUNG	12,46	68.08	5.464

21	DUKUH PAKIS	9,94	60.048	6.041
22	GAYUNGAN	6,07	45.415	7.482
23	JAMBANGAN	4,19	49.31	11.768
24	TENGGILIS	5,52	56.482	10.232
25	GUNUNG ANYAR	9,71	54.127	5.574
26	MULYOOREJO	14,21	85.344	6.006
27	SUKOMANUNGGAL	9,23	100.794	10.921
28	ASEMROWO	15,44	45.091	2.973
29	BULAK BANTENG	6,78	42.176	6.221
30	PAKAL	19,01	50.866	2.676
31	SAMBI KEREK	20,42	60.375	2.957
JUMLAH		326,46	2.943.528	9.017

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.469.888 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.473.640 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk didominasi oleh usia 30-49 tahun. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada



Tabel : Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015

Dari piramida penduduk diatas menunjukan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya di dominasi usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25-29 tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau 53,4% disbanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5-24 tahun

sebesar 1.075.396 jiwa atau 36,5% sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun keatas sebesar 296.190 jiwa atau 10,1% komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa

C. Dinas Perhubungan Kota Surabaya

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Surabaya

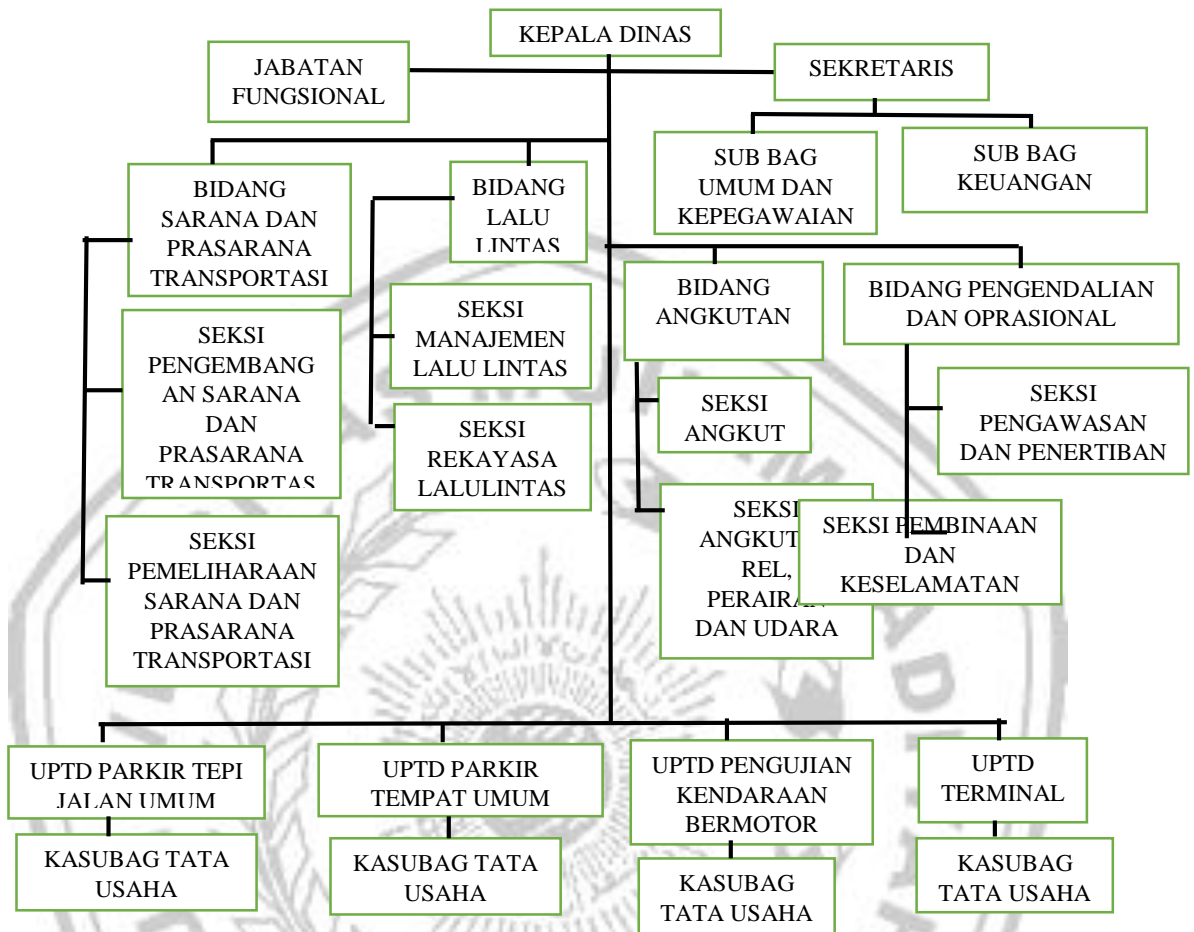
Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan penggabungan dari tiga dinas yang ada pada masa sebelum otonomi daerah yaitu Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Dinas Terminal, dan Dinas Parkir. Dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Operasional, UPTD, dan jabatan fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat dalam bagan yang tersaji di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
BERDASARKAN PERWALI KOTA SURABAYA NOMER 60 TAHUN 2016



2. Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, dan Jabatan Fungsional

- a) Kepala Dinas memiliki kewajiban seperti mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staff, melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- b) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- c) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing
- d) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan
- e) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

3. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas dan fungsi lain Sekretariat yaitu :

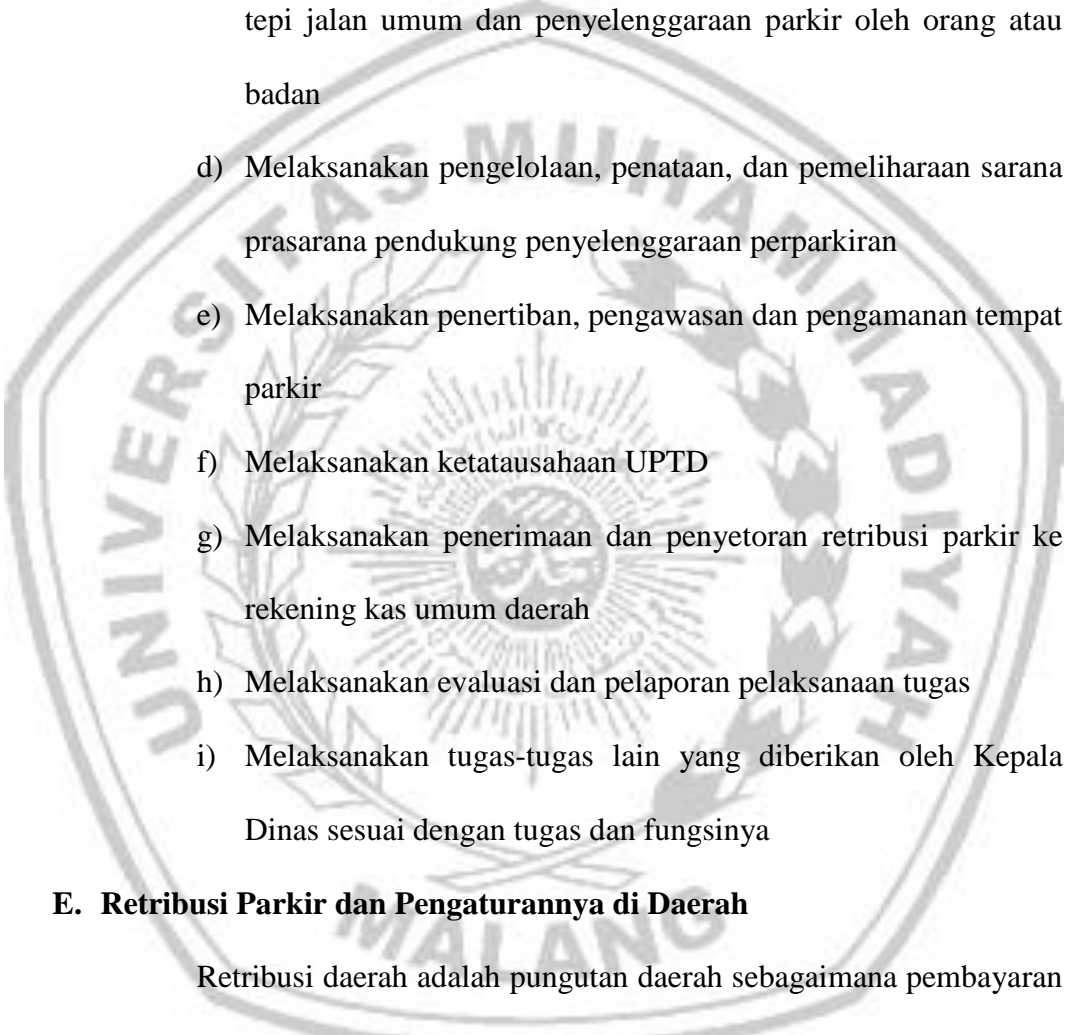
- a) Melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan / non perizinan / rekomendasi
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- e) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah

- f) Melaksanakan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol
- g) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- h) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- i) Melaksanakan perhitungan pelaporan indicator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- j) Melaksanakan koordinasi pelaporan indicator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- k) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terbagi menjadi empat bidang dan tiga unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Bidang yang tergabung dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya yakni, Bidang Angkutan, Bidang Sarana Prasarana Transportasi, Bidang Lalu Lintas, serta Bidang Pengendalian dan Operasional. Adapun unit pelaksana teknis dinas (UPTD) antara lain UPTD Parkir, UPTD Terminal, dan UPTD Uji Kendaraan.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berkaitan dengan parkir adalah UPTD Parkir di antaranya :

- 
- a) Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan perparkiran
 - b) Melaksanakan pemungutan retribusi parkir
 - c) Menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta pemrosesan permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan
 - d) Melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran
 - e) Melaksanakan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir
 - f) Melaksanakan ketatausahaan UPTD
 - g) Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke rekening kas umum daerah
 - h) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Retribusi Parkir dan Pengaturannya di Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dimana menjadi salah satu sumber pembiayaan, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten / Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir salah satunya dengan cara mengawasi proses dari retribusi parkir itu sendiri apakah telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan atau kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah. Dasar pengenaan pajak berdasarkan klarifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir ini sendiri ditetapkan oleh

pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan pemerintahan daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berekonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonom yang dimana daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD.

F. Pelanggaran Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Parkir

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Penerapan otonomi daerah diharapkan mampu mendorong perbaikan pengolahan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, setiap daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. PAD adalah salah satu jalan bagi pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah, karena PAD merupakan bentuk dari kemandirian daerah guna memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa terlalu membebani dana dari pemerintah tingkat atas. Menurut Wibowo dan Prakoso (2005:13) menyatakan bahwa memasuki era desentralisasi, rata-rata kontribusi PAD terhadap penerimaan kabupaten / kotamengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kontribusi PAD dari sektor retribusi daerah, dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak dan retribusi yang menjadi salah satu emasan PAD memiliki target dan menjadi andalan setiap daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah. Dan salah satu retribusi yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan adalah retribusi parkir.

Di Kota Surabaya retribusi dari parkir yang ada cukup mengkhawatirkan karena banyak dijumpai parkir-parkir liar di tepi badan jalan yang dapat mengurangi pemasukan retribusi parkir serta berpotensi mengganggu jalan raya sehingga dapat mengakibatkan kemacetan. PAD dari sektor perparkiran pun semakin tidak jelas dikarenakan kemunculan parkir liar ini. Mengutip Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi tepi jalan umum yaitu

pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya tentang target dan realisasi pendapatan. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2012 mengalami penurunan, dan meningkat lagi pada tahun 2013-2014. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan dari Rp. 8.483.160.000 di tahun 2011 menjadi Rp. 10.291.805.500. Namun pada tahun 2012 menurun menjadi Rp. 9.301.939.500. Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp. 11.805.883.000 dan di tahun 2014 juga meningkat menjadi Rp. 12.918.649.000 meski mengalami peningkatan realisasi penerimaan belum juga mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah.

Pada tahun anggaran 2009-2011 penerimaan retribusi parkir tempat khusus parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun di tahun 2012 mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan dari Rp. 1.178.881.500 di tahun 2011 menurun menjadi Rp. 1.168.329.000. Dan pada tahun 2013-2014 kembali mengalami peningkatan, selama tahun 2009-2013 realisasi penerimaan retribusi tempat parkir khusus tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2013-2014 realisasi penerimaan retribusi parkir berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Rata-rata realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar yaitu 0,67%, sedangkan rata-rata kontribusi retribusi tempat parkir khusus terhadap PAD hanya 0,07%. Dari

kedua hasil retribusi parkir tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi parkir turut memberikan kontribusi kepada PAD walaupun peranannya sangatlah kecil. Meskipun begitu retribusi parkir hanya sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah dan bukan berarti bahwa retribusi parkir tidak penting untuk peningkatan PAD, hanya saja retribusi parkir memberikan kontribusinya tidak sebesar sumber pendapatan asli daerah lainnya. Adapun beberapa penyebab masalah-masalah dalam konteks retribusi parkir di Kota Surabaya antara lain :

1. Tarif Parkir Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah

Permasalahan mengenai tarif parkir merupakan permasalahan yang sering dialami dan dikeluhkan oleh masyarakat. Penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir melebihi tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, No. 3 Tahun 2012, dan No. 9 Tahun 2012. Petugas parkir atau juru parkir justru menarik tarif melebihi ketentuan, padahal dalam Perda sudah dilarang menaikkan tarif parkir melebihi ketentuan yang sudah disepakati dan sudah jelas sanksi yang akan diterima, bahkan izin parkir bisa dicabut oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tarif parkir adalah biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dipungut oleh Dinas Perhubungan dari juru parkir.

2. Pelanggaran Penggunaan Karcis Parkir

Menurut ketentuan karcis parkir harus diberikan kepada konsumen sebagai tanda penggunaan jasa parkir, tetapi terkadang tidak diberikan pada pengguna jasa parkir. Pemberian karcis ini sangat penting dalam

memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tarif parkir yang sebenarnya dan menjadi dasar kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menarik retribusi parkir. Petugas parkir di Surabaya sering tidak memberikan karcisnya kepada pengguna jasa parkir karena karcis yang dibawa oleh juru parkir telah habis.

3. Parkir Liar

Permasalahan parkir liar sangat meresahkan masyarakat, selain keberadaan mereka ilegal atau tanpa izin, parkir liar ini terkadang membuat jalanan menjadi macet. Munculnya parkir liar ini juga sangat merugikan negara karena para juru parkir menarik retribusi parkir, tetapi tidak menyetorkan kepada pihak yang berwenang yaitu UPTD Parkir di Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

4. Laporan Pertanggung Jawaban Tidak Sesuai.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menggunakan pencatatan dan di publikasikan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang meminta kepada seluruh entitas pemerintahan untuk menggunakan standar yang baru, namun pada saat ini entitas pemerintahan masih menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang lama yaitu standar akuntansi berbasis kas menuju akural yang disahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagai standar akuntansi pemerintahan.

Pengawasan lapangan diperlukan juga agar dapat mengetahui kondisi dari tempat parkir terutama yang di pinggir jalan misalnya dengan bantuan CCTV yang telah banyak tersebar di beberapa titik di Kota Surabaya.

Dengan begitu, Dishub Kota Surabaya dapat mengetahui titik-titik lokasi tempat parkir yang disalahgunakan oleh juru parkir. Selain itu, partisipasi dari para pengguna jasa parkir sangat dibutuhkan seperti meminta karcis parkir terhadap juru parkir dan melaporkan ke Dishub Kota Surabaya apabila menemukan kejanggalan terkait tarif parkir serta karcis parkir. Pihak instansi pun perlu melakukan evaluasi terkait kebijakan apa yang dipilih dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan keputusan serta mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan standar yang berlaku sehingga instansi dapat saling bersinergi.

Kontribusi retribusi parkir PAD torgolong masih sangat kecil karena presentase penerimaan dari sektor parkir hanya 2% dari total PAD. Rendahnya kontribusi retribusi parkir disebabkan kurangnya pemanfaatan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor perparkiran. Hal ini menyebabkan perlunya pengevaluasian sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang ada di sistem pendapatan Pemerintah Daerah Surabaya. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal untuk retribusi parkir agar pendapatan lebih meningkat sesuai target setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir tahun 2017 bisa menembus 24,3 milyar rupiah seiring dengan diterapkannya pembayaran parkir meter dengan menggunakan uang elektronik berupa kartu. Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan pihaknya sudah memulai melakukan sosialisasi penggunaan uang elektronik untuk

membayar parkir melalui kerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, BCA, dan Mandiri selaku penyedia kartu uang elektronik (E-Money). Tranggono meyakini, dengan diterapkannya uang elektronik di mesin parkir meter milik Pemkot bisa mendongkrak pendapatan tahun ini. Adapun pendapatan dari tarif parkir di Surabaya sejak 2014 mengalami peningkatan yang signifikan yakni tercatat mencapai 13 milyar rupiah, dan pada tahun 2015 tercatat 18 milyar rupiah, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 23,8 milyar rupiah.

G. Dana Perimbangan

Dana transfer dari pusat ke daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu; dana transfer umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta dana transfer khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non-fisik. Dana transfer tersebut merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mendukung kebutuhan pendanaan di daerah.

Pada kebijakan dana perimbangan tahun 2019, terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah DAU bersifat final dan stabil. Sebelumnya, DAU bersifat tidak final, yang artinya realisasi penyaluran bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari alokasi yang telah ditetapkan, tergantung dengan penerimaan pendapatan negara. Dengan perubahan ini daerah mendapatkan kepastian pendanaan, karena alokasi yang ditetapkan bisa dipastikan akan diterima oleh daerah. Selain itu, tahun ini pemerintah menambahkan alokasi untuk kelurahan dalam DAU. Tujuannya adalah untuk mengurangi

ketimpangan antara dana di kelurahan dengan dana desa. Selain itu, pemerintah telah memperhitungkan kenaikan gaji 5% kedalam DAU, serta alokasi untuk gaji 13, THR dan CPNS baru hasil rekrutmen tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan outlook 2018, alokasi tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Untuk alokasi DBH, secara umum terdapat kenaikan dari 89, 2 triliun rupiah menjadi 106,4 triliun rupiah. Beberapa kebijakan baru di tahun 2019 di antaranya 50% dari alokasi DBH yang diterima daerah wajib digunakan untuk membiayai program dana reboisasi.

Alokasi DAK, baik fisik maupun non fisik mengalami peningkatan; DAK fisik pada tahun 2018 naik menjadi 69,3 triliun rupiah, sementara DAK non-fisik naik menjadi 131 triliun rupiah. Beberapa kebijakan yang diterapkan diantaranya; peningkatan unit cost untuk pendidikan vokasi, alokasi dana BOS untuk peningkatan kualitas pendidikan, penambahan sub bidang GOR dan perpustakaan daerah.

Selain kebijakan-kebijakan baru tersebut, pemerintah masih mempertahankan kebijakan lama yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas belanja daerah. Diantaranya dengan menetapkan 25% dari Dana Transfer Umum (DBH + DAU) untuk belanja infrastruktur pelayanan public. Kebijakan ini sudah diterapkan mulai tahun 2017 dan masih berlanjut di tahun 2019 ini.

1. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan terlebih dahulu dengan menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Ketika pemerintah daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus di pertimbangkan juga adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, akan tetapi disatu sisi lain juga akan meningkatkan beban masyarakat.

2. Gambaran Umum Retribusi Parkir Kota Surabaya

Surabaya adalah daerah nomor dua terkaya dan berpenghasilan terbesar tahun 2017. Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah yang terus berupaya menggali setiap potensi pendapatan yang ada di Kota Surabaya baik dalam bentuk tindakan nyata maupun kebijakan-kebijakan atau regulasi. Salah satu kebijakan atau regulasi Kota Surabaya yang mengatur tentang retribusi daerah adalah Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir. Retribusi parkir Kota

Surabaya adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi besar dalam PAD Kota Surabaya.

Pengaturan atau regulasi tentang retribusi perpajakan di Kota Surabaya sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan adanya potensi jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya regulasi tersebut pemungutan yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Besarnya tarif retribusi akan dilakukan peninjauan kembali serta penyesuaian dalam jangka waktu tiga tahun sekali. Peraturan atau regulasi terbaru mengenai perpajakan Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 mengenai Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9 Tahun 2012 yang merupakan produk hukum terbaru menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Perda No. 1 Tahun 2009 yang sebelumnya tidak memisahkan antara retribusi parkir tepi jalan umum dengan retribusi parkir khusus.

Pada tahun 2015, untuk melakukan peninjauan kembali tarif parkir di tepi jalan umum, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 sebagai pengganti tarif pada Perda No. 8 Tahun 2012. Untuk menerapkan aturan tersebut agar konsekuen maka pelaksanaannya diatur oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sedangkan untuk realisasi pendapatan retribusinya dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya.

H. UPTD Parkir Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah

1. UPTD Parkir Dinas Perhubungan

UPTD Parkir Kota Surabaya berada dalam naungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. UPTD Parkir ini mempunyai tugas pokok yaitu memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam urusan perparkiran. Untuk menjalankan tugas pokoknya, UPTD Parkir mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perencana kegiatan kerja UPTD Parkir
- b. Pemberian petunjuk pelaksana urusan parkir
- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Parkir
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Parkir
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan parkir
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan parkir
- g. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Parkir
- h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Parkir
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, UPTD Parkir membawahi Sub Bagian Tata Usaha. Sub bagian tata usaha sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan

kegiatan umum keorganisasian dan ketatalaksanaan. Untuk menyelenggarakan kerja Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perencanaan kegiatan kerja Sub bagian tata usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
- c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
- d. Pembimbingan pelaksanaan Sub bagian tata usaha
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
- f. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub bagian tata usaha
- g. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian tata usaha
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan daerah merupakan alat pelaksana utama Gubernur dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dinas pendapatan daerah berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sedangkan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas Pemda dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta garis-garis kenijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas umum sebagai berikut :

- a) Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- b) Membuat rancangan-rancangan Peraturan Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan rancangan keputusan pelaksanaannya yang di perlukan bagi penyelenggara tugas pokok.
- c) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.
- d) Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pemungutan daerah

- e) Meneliti Peraturan Daerah Tingkat II yang berhubungan dengan pemungutan dan penerimaan Pendapatan daerah Tingkat II.

Dapat dilihat jelas bahwa retribusi daerah merupakan wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah. Parkir merupakan salah satu aspek yang dapat di retribusikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pihak Dinas Pendapatan daerah dari tahun ke tahun selalu mengadakan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik itu mengenai hambatan dalam pemungutan retribusi maupun upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah terutama dalam hal ini retribusi parkir.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi parkir tidak dapat terlepas dari kapasitas administrasi yang tersedia di Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendapatan Daerah yaitu :

- a) Insentififikasi pendataan obyek retribusi parkir guna menjamin aktualisasi data
- b) Melakukan survei potensi ke lokasi untuk melihat apakah lokasi tersebut mampu ditingkatkan potensi lahan parkirnya, baik dengan pelebaran luas area parkir maupun daya tampungnya
- c) Mencari obyek retribusi parkir baru apabila dimungkinkan

- d) Pengawasan internal dan penyuluhan secara intensif terhadap para petugas parkir dengan melakukan pembinaan langsung oleh pimpinan unit kerja guna meningkatkan motivasi pegawai dan peningkatan kinerja
- e) Meningkatkan keahlian dan kemampuan aparat pajak dengan memberikan pembinaan yang lebih intensif
- f) khal penyediaan lahan parkir yang layak dan memadai
- g) Melakukan audit lapangan, disamping ditemukan penyimpangan dari wajib retribusi juga dapat diketahui penyimpangan dari para aparat
- h) Mengadakan perubahan Peraturan Daerah (revisi tariff), apabila Perda yang sudah berlaku tidak sesuai dengan perkembangan yang ada

I. Data Statistik APBD Kota Surabaya

Pendapatan Kota Surabaya selama tahun 2006=2010 rata-rata naik sebesar 17.61%. kenaikan pendapatan ini sering dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos pendapatan asli daerah , dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang diperoleh dari tahun ke tahun trendnya naik. Sedangkan dilihat dari struktur pendataan yang APBD selama 5 tahun, kontribusi paling besar dalam pembentukan pendapatan APBD, bersumber dari dana perimbangan hal ini hampir sama dengan beberapa kabupaten atau kota lainnya uang struktur pendapatan APBD lebih didominasi dari dana perimbangan. Kontribusi dana perimbangan dalam pendapatan APBD Kota Surabaya selama 5 tahun rata-rata sebesar 53.72%

Proporsi dana perimbangan paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 57,85 persen selanjutnya di tahun berikutnya mengalami penurunan, dan sampai tahun 2010 proporsi dana perimbangan sebesar 48,72 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan tersebut lebih disebabkan karena kenaikan dari sumber pendapatan daerah lain – lain yang sah khususnya dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lain serta bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Struktur pendapatan APBD Kota Surabaya selama 5 tahun terlihat dalam Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1

Struktur Pendapatan APBD Kota Surabaya Tahun 2006 – 2010



Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2012

Kondisi pendapatan berdasarkan data APBD dilihat dari realisasi selama 5 tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana tertera dalam table berikut :

Tabel 3.1

Realisasi APBD Tahun 2006 – 2010

NO	Uraian	Realisasi APBD (dlm Rp 000.000,-)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pendapatan Asli Daerah	538.370	607.649	729.213	809.796	1.059.891	18,70 %
a	Pajak Daerah	305.405	340.834	397.990	442.852	581.582	17,74 %
b	Hasil Daerah	166.978	176.786	169.558	164.248	288.714	18,61 %
c	Hasil Perusahaan daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.479	38.386	42.520	43.325	63.582	34,53 %
d	Lain-lain Penapatan Asli Daerah yang Sah	44.508	51.643	119.145	159.371	126.014	39,89 %

J. Data Statistik Retribusi Parkir Kota Surabaya

1. Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya

Tahun

2002-2015

Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun

2002-2015

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2002	54.880.000,00	68.000.000,00	80.70
2003	211.855.000,00	177.000.000,00	119.69
2004	234.615.000,00	234.000.000,00	100.26
2005	252.305.000,00	252.240.000,00	100.03
2006	361.787.000,00	8.967.566.500,00	3.95
2007	612.064.750,00	7.859.319.300,00	7,80
2008	3.600.511.750,00	4.000.000.000,00	90.01
2009	11.884.820.000,00	9.000.000.000,00	132.05
2010	440.459.039.540,00	400.000.000.000,00	142.08
2011	761.569.087.650,00	710.070.322.110,00	165.87
2012	813.760.978.239,00	805.060.978.560,00	171.65
2013	1.018.569.687.039,00	1.000.000.000.000,00	210.58
2014	1.230.079.567.890,00	1.045.870.546.978,00	230.60
2015	1.303.210.546.740,00	1.286.093.864.542,00	247.51

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

2. Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Kota

Surabaya Tahun 2002-2015

Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota

Surabaya Tahun 2002-2015

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2002	85.738.557.355,45	81.439.599.900,00	105.27
2003	112.984.282.252,87	96.844.214.160,00	116.66
2004	128.818.128.145,00	115.590.674.310,00	111.44
2005	135.311.777.381,61	127.299.095.300,00	106.29
2006	178.026.166.944,90	160.315.879.933,99	111.04
2007	190.905.404.878,17	178.206.361.792,17	107.12
2008	212.747.727.368,58	202.179.688.060,75	105.22
2009	284.660.711.556,09	258.422.578.156,98	110.15
2010	1.760.029.453.780,08	2.106.769.340.220,00	350.55
2011	3.044.124.791.757,37	3.637.069.260.868,48	421.56
2012	4.065.436.980.560,00	4.090.231.650.658,65	501.98
2013	5.092.599.934.103,00	5.720.099.162.102,00	597.43
2014	6.150.194.212.903,00	7.072.715.425.304,00	612.41
2015	6.516.306.800.495,00	7.269.442.530.623,00	631.43

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

Dari data statistik di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah kota Surabaya tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika dilihat rasio persentasenya, paling tidak mengalami kenaikan sebesar 7% tiap tahunnya. Hal ini dimungkinkan melihat kota Surabaya yang tiap tahunnya mengalami

kemajuan infrastruktur dan sarana prasarana. Dengan demikian, dengandiberlakukanya peraturan walikota no 36 tahun 2015 membawa dampak positif dengan naik.nya pendapatan dari retribusi parkir di Kota Surabaya.

